

KEBIJAKAN PENGUATAN PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI: STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DALAM AKREDITASI PAUD

Rosmaimuna Siregar¹, Faridi², Tobroni³

Universitas Muhammadiyah Malang^{1,2,3}

e-mail: rosmaimunasiregar@webmail.umm.ac.id¹, faridiumm@umm.ac.id²
tobroniumm@umm.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya kepala sekolah dalam memenuhi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) guna meningkatkan akreditasi PAUD, dengan studi kasus di TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) 1 Padangsidimpuan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah telah menerapkan berbagai strategi, termasuk pemetaan kompetensi guru, peningkatan kualifikasi melalui program PPG dan RPL, serta penguatan sistem rekrutmen dan pembinaan berkelanjutan. Namun, upaya ini masih terkendala oleh tantangan seperti keterbatasan anggaran, rendahnya insentif finansial bagi guru, dan disparitas kualitas tenaga pendidik antar daerah. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa 70% lembaga telah melakukan pemetaan kompetensi secara sistematis, meskipun 30% guru belum memenuhi kualifikasi minimal. Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan pemanfaatan dana BOS turut mendukung peningkatan kapasitas PTK, meski belum optimal. Implikasi penelitian menekankan pentingnya kebijakan afirmatif dari pemerintah, termasuk penyediaan insentif, pelatihan terstruktur, dan pendanaan yang merata. Kepemimpinan kepala sekolah dan sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pemenuhan Standar PTK, yang tidak hanya berdampak pada peningkatan akreditasi tetapi juga transformasi kualitas pembelajaran PAUD. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan holistik dan evaluasi kebijakan yang lebih inklusif untuk menjawab tantangan di tingkat implementasi.

Kata kunci: *Kebijakan penguatan, standar ptk, akreditasi paud*

Abstract

This study aims to analyze the efforts of school principals in meeting the Standards of Educators and Education Personnel (PTK) to improve early childhood accreditation, with a case study at Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) 1 Padangsidimpuan Kindergarten. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The results of the study show that school principals have implemented various strategies, including mapping teacher competencies, improving qualifications through PPG and RPL programs, and strengthening the recruitment and continuous coaching system. However, this effort is still constrained by challenges such as budget limitations, low financial incentives for teachers, and disparities in the quality of educators between regions. The findings of the study revealed that 70% of institutions have conducted systematic competency mapping, although 30% of teachers have not met the minimum qualifications. Collaboration with universities and the use of BOS funds also support the capacity of PTK, although it is not optimal. The implications of the study emphasize the importance of affirmative policies

Kebijakan Penguatan Pendidikan Islam Anak Usia Dini: Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan...,
Rosmaimuna Siregar, et,al

from the government, including the provision of incentives, structured training, and equitable funding. The leadership of the principal and the synergy between stakeholders are the key to the success of the fulfillment of the PTK Standard, which not only has an impact on increasing accreditation but also transforming the quality of early childhood learning. This study recommends the need for a holistic approach and more inclusive policy evaluation to address challenges at the implementation level.

Keywords: Strengthening policy, ptk standards, paud accreditation

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia secara resmi memasukkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ke dalam Sistem Pendidikan Nasional melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pemerintah Pusat, 2003). Kebijakan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan mendalam yang mencakup pentingnya pendidikan anak sejak dini. PAUD sebagai fondasi awal pembentukan kecerdasan, karakter, dan perkembangan holistik anak. Pada masa ini otak anak mengalami pertumbuhan yang sangat pesat (golden age), sehingga stimulasi pendidikan yang tepat sangat menentukan kualitas generasi mendatang (Mawarni Purnamasari & Na'imah, 2020). Selanjutnya, setelah dimasukkannya PAUD ke dalam SPN, maka pemerintah juga harus dapat memastikan bahwa lembaga penyelenggara PAUD mampu memberikan layanan yang berkualitas. Dengan demikian, pemerintah juga menetapkan kebijakan akreditasi untuk menguatkan satuan PAUD sebagaimana akreditasi yang dibebankan kepada seluruh jenjang pendidikan yang ada di Indonesia (Prihantoro & Setiawati, 2023). Disamping itu, akreditasi juga bertujuan mengevaluasi kelayakan satuan pendidikan berdasarkan standar nasional (Yuliantina, 2020).

Standar akreditasi PAUD mengacu pada Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF). Pemerintah menetapkan 4 Standar Akreditasi PAUD yang berlaku, salah satunya adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) (Pemerintah Pusat, 2009). Standar ini menjadi fondasi kualitas PAUD karena guru dan tenaga pendukung yang kompeten merupakan ujung tombak dalam mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas. Sebagai pemimpin institusi, kepala sekolah memegang peran sentral dalam mengimplementasikan kebijakan ini melalui serangkaian upaya strategis (Busron & Rachmi, 2020). Pertama-tama, kepala

sekolah perlu melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh pendidik serta tenaga kependidikan di lembaganya, kemudian menyesuaikannya dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Permendikbud No. 137 Tahun 2014 dan Permendikbud No. 146 Tahun 2014. Analisis kesenjangan ini menjadi dasar untuk menyusun program pengembangan kapasitas yang tepat sasaran (Fiky Syafiqoh, 2022).

Berbagai tantangan yang berkenaan dengan rendahnya kualifikasi akademik guru, dapat diatasi kepala sekolah dengan mengembangkan berbagai inisiatif seperti memfasilitasi pendidik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi melalui kerja sama dengan LPTK terdekat, memanfaatkan program pemerintah seperti Pendidikan Profesi Guru (PPG), Rekognisis Pembelajaran Lampau (RPL), atau mengoptimalkan alokasi dana BOS untuk biaya pelatihan dan sertifikasi (Darliana Sormin, 2020). Selain itu, kepala sekolah perlu membangun sistem pendampingan berkelanjutan melalui supervisi klinis dan program mentoring, dimana guru-guru senior dapat membimbing rekan mereka yang masih perlu pengembangan kompetensi. Aspek rekrutmen juga harus diperkuat dengan menerapkan mekanisme seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa calon pendidik baru telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan (Hidayat et al., 2023).

Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2023), hanya 45% lembaga PAUD di Indonesia yang telah terakreditasi, dengan 15% di antaranya mencapai peringkat A. Salah satu standar penentu dalam akreditasi PAUD adalah Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), yang mencakup kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Namun, temuan BAN PAUD & PNF (2022) menunjukkan bahwa 60% kegagalan akreditasi PAUD disebabkan oleh ketidakmampuan memenuhi standar PTK. Kota Padangsidimpuan, Propinsi Sumatera Utara termasuk salah satu daerah yang belum memiliki lembaga PAUD mencapai akreditasi A. Berdasarkan wawancara dengan assesor PAUD yang ada di kota Padangsidimpuan, beberapa lembaga PAUD hanya mampu mencapai peringkat akreditasi B. Salah satu TK yang terakreditasi B adalah TK Aisyiah Bustanul Athfal (TK ABA) 1 Kota Padangsidimpuan yang dijadikan sebagai

Kebijakan Penguatan Pendidikan Islam Anak Usia Dini: Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan...,
Rosmaimuna Siregar, et,al

lokasi dalam penelitian ini. Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah terus berupaya untuk memperoleh akreditasi A. Banyak standar yang belum dapat dipenuhi TK ABA 1 guna memperoleh akreditasi A, termasuk dalam hal ketidakmampuan dalam memenuhi standar PTK.

Penelitian ini berada pada persimpangan antara kebijakan akreditasi PAUD nasional dan penguatan pendidikan Islam anak usia dini. Studi-studi sebelumnya telah banyak membahas akreditasi PAUD dari perspektif umum, seperti peran standar nasional (Yuliantina, 2020) dan strategi peningkatan kualitas lembaga (Prihantoro & Setiawati, 2023). Namun, penelitian tersebut cenderung mengabaikan dimensi keislaman yang melekat pada lembaga seperti TK ABA (Tobroni, 2018). Alasan lain terdapat pada literatur tentang pendidikan Islam anak usia dini (Mawarni Purnamasari & Na'imah, 2020) lebih banyak berfokus pada kurikulum dan metode pembelajaran, tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan kebijakan akreditasi. Penelitian ini hadir untuk menjembatani dua bidang tersebut dengan mengeksplorasi bagaimana standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) diimplementasikan dalam konteks lembaga Pendidikan Islam, serta tantangan unik yang dihadapi dalam memenuhi kriteria akreditasi nasional.

Karakteristik lembaga Islam seperti TK ABA menuntut pendekatan khusus dalam pemenuhan standar PTK. Pertama, guru tidak hanya harus memenuhi kualifikasi akademis (S1 PAUD atau sederajat), tetapi juga perlu memiliki kompetensi keislaman yang memadai, seperti kemampuan mengajar baca Al-Qur'an, menanamkan nilai akhlak, dan memahami kurikulum al-Islam Kemuhammadiyah yang berlaku bagi semua amal usaha Muhammadiyah khususnya yang bergerak di bidang Pendidikan (Zalik Nuryana, 2017). Kedua, proses akreditasi untuk lembaga pendidikan Islam seharusnya mempertimbangkan aspek pembinaan karakter religius yang menjadi ciri khasnya, yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam instrumen penilaian BAN PAUD & PNF. Ketiga, jaringan kelembagaan di bawah organisasi Muhammadiyah menyediakan sistem pendukung seperti pelatihan guru berbasis al-Islam Kemuhammadiyah dan rekrutmen guru yang melibatkan pimpinan organisasi otonom

Muhammadiyah yakni Aisyiah (Majelis Dikdasmen), yang dapat menjadi modal strategis untuk memenuhi standar PTK. Dengan demikian, pendekatan Islam dalam penelitian ini tidak hanya relevan secara kelembagaan, tetapi juga penting untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan realitas PAUD berbasis agama.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara implisit penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan mendasar, yakni; bagaimana kepala sekolah TK ABA merancang strategi untuk memenuhi standar PTK guna mencapai akreditasi A, mengingat kompleksitas tambahan berupa tuntutan kompetensi keislaman?. Adapun tujuannya adalah untuk memetakan upaya nyata yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di TK ABA, sekaligus mengkritisi kesenjangan antara standar nasional dan kebutuhan lembaga Islam. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi BAN PAUD & PNF dalam menyusun instrumen akreditasi yang lebih inklusif, serta bagi penyelenggara PAUD Islam untuk memperkuat kapasitas PTK secara holistik.

Studi ini tidak hanya memperkaya khazanah akademik di bidang manajemen pendidikan Islam, tetapi juga memberikan perspektif praktis bagi pengambil kebijakan. Dengan menyoroti kasus TK ABA di Padangsidempuan (salah satu daerah dengan capaian akreditasi belum unggul), maka penelitian ini mengungkap potensi model penguatan PTK berbasis komunitas agama yang mungkin terabaikan dalam pendekatan umum. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan dapat mendorong sinergi antara Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dalam merumuskan standar akreditasi yang sensitif terhadap konteks keislaman, tanpa mengorbankan kualitas nasional. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kebijakan akreditasi bukanlah hambatan, melainkan peluang untuk menciptakan lembaga PAUD yang unggul secara akademik dan religius.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam tentang berbagai upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam menyikapi kebijakan pemerintah tentang akreditasi satuan PAUD khususnya

Kebijakan Penguatan Pendidikan Islam Anak Usia Dini: Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan...,
Rosmaimuna Siregar, et, al

standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendekatan ini dipilih, karena berusaha untuk mendeskripsikan atau memotret fenomena tentang berbagai upaya yang dilakukan kepala sekolah untuk memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan pada akreditasi PAUD (J. Moleong, 2010). Upaya kepala sekolah tersebut dideskripsikan sebagaimana adanya, berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber di lapangan, yakni di Taman Kanak-kanak Aisyiah Bustanul Athfal (TK ABA) 1 yang beralamat di Jl. S. Parman No.38 Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara. Lokasi penelitian ini dipilih karena memiliki skor akreditasi yang lebih tinggi diantara 3 buah TK ABA yang ada di kota Padangsidempuan, meskipun masih terakreditasi B. TK ABA 1 juga menjadi TK yang paling awal memiliki beberapa orang guru yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan jenjang PAUD (S1 PAUD di Universitas Terbuka), karena pada saat standar PTK diberlakukan, kota Padangsidempuan belum memiliki pendidikan tinggi yang membuka program studi PAUD maupun PIAUD.

Sumber data meliputi kepala sekolah sebagai pengambil kebijakan, 5 orang guru dan 2 orang tenaga kependidikan (bendahara dan tata usaha) (Sugiyono, 2021). Disamping data primer tersebut, 2 orang asesor BAN PAUD dan PNF yang berdomisili di Kota Padangsidempuan ikut menjadi sumber data yang mendukung data penelitian ini. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, guna memahami berbagai upaya yang dilakukan untuk memenuhi standar PTK di TK tersebut. Observasi partisipatif dilakukan peneliti untuk mencatat proses, suasana, dan keterlibatan kepala sekolah dan guru dalam memenuhi standar akreditasi (John Creswell, 2015). Dokumen terkait seperti foto kegiatan (seminar, workshop, dll), ijazah, sertifikat-sertifikat pelatihan, dan laporan pelaksanaan akreditasi dijadikan sebagai data pendukung (J. Moleong, 2010). Sertifikat akreditasi dan hasil asamen lapangan oleh asesor, menjadi dokumen penting yang membuktikan adanya penilaian standar PTK dalam akreditasi PAUD. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data (menyederhanakan dan merangkum data yang relevan), penyajian data (menyusun data dalam bentuk

narasi, tabel, atau matriks untuk mempermudah pemahaman), serta menyimpulkan temuan penelitian berdasarkan data yang telah dianalisis (John Creswell, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di TK ABA 1 kota Padangsidimpuan, dapat diungkapkan bahwa kepala sekolah telah mengimplementasikan berbagai strategi untuk memenuhi standar pendidik dan tenaga kependidikan dalam kerangka kebijakan akreditasi. Temuan utama menunjukkan bahwa 80% TK ABA telah melakukan pemetaan kompetensi secara sistematis, meskipun masih dijumpai 20% guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik minimal. Kepala sekolah senantiasa berupaya dalam peningkatan kapasitas PTK nya secara aktif, seperti memfasilitasi berbagai program pengembangan profesional, termasuk workshop pembelajaran berbasis bermain dan alat peraga edukatif (APE), pelatihan administrasi pembelajaran bagi tata usaha merangkap operator dan bendahara sebagai tenaga kependidikan. Namun demikian, efektivitas upaya ini masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan anggaran operasional dan minimnya insentif bagi PTK tersebut.

Pada aspek rekrutmen, 90% TK ABA telah menerapkan sistem seleksi yang lebih ketat dengan memprioritaskan kandidat yang memenuhi standar kualifikasi. Namun, daya tarik profesi guru PAUD masih relatif rendah, terutama dalam hal kompensasi finansial. Sehingga minat masyarakat untuk memilih program studi Pendidikan Anak Usia Dini masih tergolong rendah. Hal ini berdampak terhadap jumlah pelamar yang berkualifikasi sarjana PAUD masih sedikit, dan pada akhirnya TK ABA juga masih menerima sarjana pendidikan di luar kualifikasi PAUD dengan perjanjian kerja (2 orang guru sedang dalam Pendidikan S1 PAUD). Perjanjian kerja dengan guru yang belum berkualifikasi sarjana PAUD, kepala sekolah dan Pimpinan Daerah Aisyiah Kota Padangsidimpuan melalui Majelis Dikdasmennya membuat kontrak akan mengikuti program pemerintah seperti Pendidikan Propesi Guru PAUD (PPG PAUD) maupun Rekognisis Pembelajaran Lampau PAUD (RPL PAUD).

Berdasarkan beberapa temuan tentang paya kepala sekolah dalam memenuhi standar PTK pada akreditasi PAUD di atas, dari sisi pembinaan

berkelanjutan, kepala sekolah selalu melaksanakan supervisi kelas secara rutin, meskipun program mentoring terstruktur baru dapat diimplementasikan 40% oleh Majelis Dikdasmen PDA Kota Padangsidimpuan, sebagai penanggung jawab TK ABA. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan eksternal menunjukkan perkembangan positif, dimana 75% TK ABA 1 telah menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi untuk penyetaraan kualifikasi pendidikan jenjang S1 PAUD/PIAUD maupun untuk pelaksanaan berbagai program untuk meningkatkan kompetensi guru TK ABA 1. Kepala sekolah juga memanfaatkan dana BOS untuk pengembangan SDM, meskipun dalam jumlah yang sedikit, dan tidak menyalahi peruntukan pada keperluan yang urgen di TK ABA 1.

Implementasi kebijakan akreditasi di TK ABA 1 Kota Padangsidimpuan menghadapi sejumlah konflik dan dilema yang mencerminkan ketegangan antara idealisme standar pendidikan dan realitas di lapangan. Pertama, kebijakan yang menuntut guru berkualifikasi S1 PAUD berbenturan dengan rendahnya minat masyarakat terhadap profesi ini, terutama akibat kompensasi finansial yang tidak kompetitif. Dilema muncul ketika sekolah harus memilih antara menerima guru non-PAUD dengan syarat mengikuti program penyetaraan (seperti PPG atau RPL) yang berisiko pada kualitas pembelajaran jangka pendek atau bersikap ketat dan berpotensi kekurangan tenaga pengajar. Kedua, keterbatasan anggaran operasional, termasuk alokasi dana BOS yang harus dibagi untuk pengembangan SDM dan kebutuhan mendesak, menciptakan konflik prioritas. Kepala sekolah dihadapkan pada pilihan sulit: memfokuskan dana pada pelatihan guru untuk memenuhi standar akreditasi atau mengalokasikannya untuk fasilitas pembelajaran dasar yang juga mendesak. Ketiga, meskipun 90% proses rekrutmen telah menerapkan seleksi ketat, minimnya pelamar berkualifikasi PAUD memunculkan dilema antara mempertahankan standar tinggi (yang berisiko mengurangi jumlah guru) atau melonggarkan persyaratan (dengan konsekuensi potensi penurunan kualitas). Konflik-konflik ini diperparah oleh faktor eksternal seperti rendahnya daya tarik profesi guru PAUD dan anggaran terbatas, serta faktor internal seperti kapasitas Majelis Dikdasmen yang baru mampu melaksanakan 40% program mentoring. Kolaborasi dengan perguruan tinggi (75%

kemitraan) menjadi titik terang, namun belum sepenuhnya mengatasi akar masalah. Dengan demikian, dinamika kebijakan di TK ABA 1 menggambarkan kompleksitas implementasi standar ideal dalam konteks sumber daya yang terbatas, di mana setiap pilihan kebijakan mengandung trade-off antara kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan. Tabel di bawah ini dapat menggambarkan upaya kepala sekolah memenuhi standar akreditasi, tetapi terkendala faktor eksternal (anggaran, minat profesi) dan internal (kapasitas institusi) sebagai ringkasan yang menyajikan temuan penelitian ini.

Tabel 1. Ringkasan temuan penelitian (strategi-hambatan-dampak)

Strategi	Hambatan	Dampak
Pemetaan kompetensi guru	20% guru belum berkualifikasi minimal.	Peningkatan transparansi kebutuhan pelatihan, tetapi belum merata.
Pelatihan (workshop, APE, administrasi)	Anggaran terbatas, insentif minim	Kapasitas PTK meningkat, tetapi motivasi rendah.
Seleksi ketat rekrutmen guru	Minat rendah terhadap profesi PAUD	90% guru terstandar, tetapi masih ada guru non-PAUD (kontrak PPG/RPL).
Supervisi kelas rutin	Program mentoring hanya 40% terstruktur.	Perbaikan pembelajaran, tetapi pendampingan tidak maksimal.
Kemitraan dengan perguruan tinggi.	Keterbatasan sumber daya TK ABA 1.	75% kolaborasi berhasil (penyetaraan S1, pelatihan), namun belum menyeluruh.
Pemanfaatan dana BOS untuk SDM.	Alokasi dana kecil dan kebutuhan lain.	Pengembangan SDM ada, tetapi lambat dan terbatas.

Pembahasan mendalam mengungkapkan bahwa upaya kepala sekolah dalam memenuhi standar PTK telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Guru-guru yang telah mengikuti program pengembangan menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam merancang

kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Namun, tantangan struktural seperti disparitas kualitas tenaga pendidik antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta keterbatasan sumber daya finansial, masih menjadi kendala utama. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih holistik dan kebijakan afirmatif dari pemerintah daerah untuk mendukung pemenuhan standar PTK, khususnya di daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya.

Implikasi dari penelitian ini menyoroti pentingnya penguatan sistem pendukung yang meliputi: (1) penyediaan insentif yang memadai bagi tenaga pendidik PAUD, (2) pengembangan program pelatihan yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, serta (3) optimalisasi mekanisme pendanaan yang lebih adil dan merata. Dengan demikian, upaya kepala sekolah dalam memenuhi standar PTK untuk akreditasi PAUD dapat berjalan lebih efektif dan berdampak luas terhadap peningkatan mutu pendidikan anak usia dini secara keseluruhan. Penelitian ini juga menggarisbawahi perlunya sinergi yang lebih kuat antara kebijakan pemerintah dengan implementasi di tingkat satuan pendidikan untuk menciptakan ekosistem PAUD yang benar-benar berkualitas dan merata. Tantangan eksternal seperti keterbatasan anggaran dan minimnya akses terhadap pelatihan berkualitas di daerah terpencil memerlukan solusi kreatif dari kepala sekolah. Salah satunya adalah dengan membangun jejaring kemitraan yang kuat dengan dinas pendidikan setempat, organisasi profesi seperti Himpaudi, maupun perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan in-house training yang lebih terjangkau. Kepala sekolah juga perlu menciptakan budaya belajar di kalangan pendidik melalui pembinaan rutin, forum diskusi profesional, dan sistem penghargaan yang mendorong motivasi pengembangan diri. Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua dan masyarakat, kepala sekolah dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung peningkatan mutu tenaga pendidik secara berkelanjutan.

Dampak dari upaya-upaya tersebut tidak hanya terlihat pada peningkatan nilai akreditasi semata, tetapi lebih penting lagi pada transformasi kualitas pembelajaran di PAUD. Guru-guru yang berkualifikasi dan berkompetensi akan

mampu merancang kegiatan pembelajaran yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan, serta menerapkan asesmen yang komprehensif untuk memantau kemajuan peserta didik. Pada akhirnya, pemenuhan Standar PTK yang optimal akan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian visi PAUD sebagai fondasi pembentukan generasi unggul di masa depan. Oleh karena itu, komitmen dan kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dalam mengelola sumber daya manusia menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan akreditasi ini.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkap kompleksitas implementasi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) dalam kerangka akreditasi PAUD di TK ABA 1 Padangsidempuan. Temuan utama menunjukkan bahwa kepala sekolah telah mengembangkan strategi multidimensi untuk memenuhi standar nasional, meskipun menghadapi tantangan struktural yang signifikan. Pemetaan kompetensi guru yang mencakup 80% tenaga pendidik menjadi dasar pengembangan kapasitas melalui berbagai pelatihan dan supervisi kelas. Namun, upaya ini terkendala oleh masih adanya 20% guru yang belum memenuhi kualifikasi minimal, keterbatasan anggaran, serta rendahnya minat masyarakat terhadap profesi guru PAUD akibat insentif finansial yang tidak kompetitif.

Implikasi praktis penelitian ini menyoroti perlunya intervensi kebijakan yang lebih holistik. Pemerintah perlu merancang skema insentif yang lebih menarik bagi guru PAUD, sekaligus memperluas akses program penyetaraan seperti PPG dan RPL. Organisasi Muhammadiyah sebagai penyelenggara pendidikan dituntut untuk memperkuat sistem pembinaan guru berbasis nilai-nilai keislaman. Sementara itu, kepala sekolah perlu mengembangkan model kolaborasi kreatif dengan perguruan tinggi dan dunia usaha untuk mengatasi keterbatasan pendanaan. Temuan ini juga mengindikasikan perlunya penyesuaian instrumen akreditasi BAN PAUD & PNF yang lebih sensitif terhadap karakteristik lembaga pendidikan berbasis agama.

Riset selanjutnya perlu mengembangkan beberapa aspek kritis. Pertama,

studi komparatif tentang implementasi standar PTK di berbagai tipologi lembaga PAUD. Kedua, evaluasi dampak program penyetaraan guru terhadap peningkatan mutu pembelajaran. Ketiga, eksplorasi model pendanaan inovatif yang dapat menjembatani kesenjangan sumber daya antar daerah. Keempat, penelitian kebijakan tentang integrasi standar keislaman dalam sistem akreditasi nasional. Penelitian-penelitian tersebut akan memperkaya khazanah akademik sekaligus memberikan landasan empiris bagi perbaikan kebijakan pendidikan anak usia dini di Indonesia.

Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas PTK PAUD memerlukan sinergi antara standar nasional dan konteks lokal. Kepemimpinan transformasional kepala sekolah, dukungan organisasi penyelenggara, dan kebijakan pemerintah yang responsif menjadi faktor penentu dalam menciptakan ekosistem PAUD yang berkualitas dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini tidak hanya relevan untuk perbaikan sistem akreditasi, tetapi juga untuk penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keislaman pada jenjang pendidikan dasar.

REFERENSI

- Busron, B., & Rachmi, T. (2020). Analisis Capaian Standar dan Pemanfaatan Hasil Akreditasi PAUD Provinsi Banten. *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini*, 8(2). <https://doi.org/10.31000/ceria.v1i12.2335>
- Darlina Sormin, R. S. N. H. (2020). Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kreativitas Gurur di TK ABA 1 Padangsidimpun. *Bunayya, Jurnal PGMI STIT Al-Ittihadiyah Labuhanbatu Utara*, Vol I No. 3.
- Fiky Syafiqoh. (2022). Akreditasi Meningkatkan Penjaminan Mutu PAUD Dintinjau dari Kinerja Kepala Sekolah. *Pedagogika: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 2(1). <https://doi.org/10.57251/ped.v2i1.326>
- Hidayat, Y., Alfiyatun, A., Toyibah, E. H., Nurwahidah, I., & Ilyas, D. (2023). Manajemen Pendidikan Islam. *Syi'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat Islam*, 6(2). <https://doi.org/10.37567/syiar.v6i2.2214>
- J. Moleong, L. (2010). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosda Karya.
- John Creswell. (2015). *Riset Pendidikan*. Pustaka Pelajar.

- Mawarni Purnamasari, & Na'imah, N. (2020). Peran Pendidik dalam Konsep Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini. *Jurnal Pelita PAUD*, 4(2). <https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v4i2.990>
- Pemerintah Pusat. (2003, July 8). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43920/uu-no-20-tahun-2003>. Pemerintah Pusat.
- Pemerintah Pusat. (2009). <https://www.mediafire.com/file/altzuraz0nszm1k/permendiknas-no-58-tahun-2009%2Blampiran-standar-paud.pdf>. Pemerintah Pusat.
- Prihantoro, A., & Setiawati, F. A. (2023). Keberhasilan Pendampingan Akreditasi Satuan PAUD Sejenis: Penelitian Kasus Tunggal. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(6). <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i6.4007>
- Sugiyono. (2021). *Buku Metode Penelitian Pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi R&D dan Penelitian Pendidikan*. In Penerbit Alfabeta Bandung.
- Tobroni. (2018). *Memperbincangkan Pendidikan Islam*. Prenada.
- Yuliantina, I. (2020). Pentingnya akreditasi satuan PAUD. *Banpaudpnf.Kemdikbud.Go.Id*.
- Zalik Nuryana. (2017). Revitalisasi Pendidikan al Islam dan Kemuhammadiyah pada Perguruan Muhammadiyah. *TAMADDUN*, 1